

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN STATUS DESA MENUJU DESA MANDIRI (STUDI DESA MIAU BARU KECAMATAN KONGBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR)

Anjelita¹, Budiman², Jumansyah³
Universitas Mulawarman
Email: anjelitajela00@gmail.com¹

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate how the village government efforts to improve the status of the village to become an independent village in Miau Baru Village, Kongbeng District, East Kutai Regency. Data analysis used in this study is descriptive qualitative which aims to describe and analyze each of the variables studied. Data collection techniques in this study were obtained by using purposive sampling and accidental sampling techniques. The results showed that based on the readiness of each of the efforts made by the Miau Baru Village Government, it was not optimal to improve the status of the village to become an independent village. Each of these efforts has a relationship that influences each other in taking steps as an effort to improve the status of the village towards an independent village. These efforts include 1) Organizational Capacity Efforts; 2) Program Planning and Implementation Efforts; 3) Efforts to Availability of Resources and; 4) Institutional Efforts. The inhibiting factors come in terms of budget and human resources as well as the support for good collaboration between village governments, the potential for local culture and adequate natural resources.

Keywords: Village Government Efforts, Village Status, Independent Village

Latar Belakang

Desa memiliki wewenang berdasarkan pasal Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa yaitu melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota dan merupakan bagian dari Pemerintahan Daerah. Dengan demikian negara mengambil sebuah dedikasi yang kuat untuk meningkatkan kemampuan desa

dengan memberdayakan masyarakat lokal yang ada dengan tujuan menjadikan sebuah desa menjadi desa yang damai, sejahtera dalam segi ekonomi, sosial maupun ekologi berkelanjutan serta menjadikan sebuah desa menjadi desa yang mandiri. Selain itu diharapkan desa yang mandiri dimana desa bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan subyek pemberi manfaat bagi masyarakat setempat serta mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi masyarakat, dan juga mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dan

¹ Mahasiswa S1 Pemerintahan Integratif Universitas Mulawarman

² Dosen Fak. ISIPOL Univeritas Mulawarman

³ Dosen Fak. ISIPOL Univeritas Mulawarman

mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat seperti : pangan, energi, layanan dasar, dan lain-lain.

Mendukung kebijakan tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (IDM) melalui Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi yang bertujuan untuk menguatkan pembangunan berskala prioritas dengan menjadikan 5000 desa tertinggal menjadi sedikitnya 2000 desa mandiri.

Desa mandiri atau yang disebut desa sembanda adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan (Hamidi 2015:17). Desa akan lebih cepat menjadi desa yang mandiri apabila Pemerintah Desa menurut (Widjaja 2003:3) adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat desa mampu memaksimalkan Kapasitas Organisasi, Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Ketersediaan Sumber Daya (Alam dan Manusia), dan Kelembagaan Desa seperti yang dijelaskan oleh Kurniawan (2015:27) dalam buku Desa Mandiri.

Kesiapan merupakan hal yang harus diperhatikan baik oleh individu maupun kelompok dalam melaksanakan perubahan dalam meningkatkan status desa menuju desa mandiri. Kesiapan yang dimaksud dalam hal ini berupa upaya oleh pemerintah desa dalam mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan desa guna meningkatkan status desa menuju desa mandiri. Kesiapan ini dapat berupa kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan kelembagaan desa dan menciptakan *terobosan* baru yang mampu meningkatkan status desa menuju desa mandiri sesuai

dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Seperti yang diuraikan dalam penelitian terdahulu terkait dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan potensi di wilayahnya menuju desa mandiri.

Pertama; penelitian Nugraningsih dkk dalam jurnal jab.fe.uns.ac.id yang berjudul Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi BUM Desa dalam rangka kemandirian ekonomi desa, bahwa sumber-sumber dana untuk peningkatan pendapatan desa yang diberikan BUMDesa masih belum dapat dikatakan memenuhi dan tidak meningkatkan pendapatan desa. Seharusnya inilah yang menjadi motivasi tersendiri bagi desa Bulusulur. Akan tetapi, yang terjadi di lapangan ialah bahwasanya BUMDesa ini juga masih belum berkontribusi penuh sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi (Putri Nugrahaningsih dkk: 2016).

Kedua; penelitian Soetopo dkk dalam Jurnal Ilmiah Kependidikan yang berjudul Desa Gombengsari Sebagai Desa Ekowisata Dengan Branding Kopi Menuju Desa Mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya minat untuk membuka kafe kopi oleh para barista - barista baru yang mampu memberikan peluang untuk penyerapan tenaga kerja baru. Pengabdian dengan skim KKN-PPM dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan warga Desa Gombengsari, khususnya pengelolaan dan optimalisasi mewujudkan desa ekowisata berbasis masyarakat (Dhalia Soetopo dkk: 2019).

Dengan mengacu pada kedua hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya penelitian di Desa Bulusulur tersebut mengarah kepada peningkatan keabilitas dan kapasitas aparat Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa. Kemudian, penulis melihat yang menjadi fokus penelitian tersebut yaitu

paradigma partisipasi masyarakat dalam implementasi program kerja melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sehingga dalam hal ini Putri dkk meneliti mengenai perencanaan strategi, pemograman, penganggaran, implementasi, maupun pendampingan pengelolaan keuangan BUMDes.

Selanjutnya, pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dhalia Sotopo dkk di Desa Gombengsari mengarah kepada memanfaatkan potensi sumber daya alam yang besar yang dimiliki Desa Gombengsari yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya mampu lebih baik dibandingkan desa di wilayah lain. Penelitian di Gombengsari tersebut berfokus pada kemampuan desa dalam memanfaatkan *branding* kopi sebagai desa ekowisata menuju desa mandiri.

Melalui penelitian terdahulu tersebut, maka dalam penelitian ini penulis lebih mengarah kepada keterlibatan aktif baik pihak aparatur maupun masyarakat desa dalam mengelola dan menghidupi masyarakat melalui potensi-potensi yang ada di Desa Miau Baru dalam segi sosial, ekonomi dan budaya guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas menuju desa yang mandiri. Penelitian ini juga akan berfokus kepada bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan status desa menjadi desa yang desa mandiri.

Hal ini tentu selaras dengan visi yang dimiliki Indonesia saat ini, dimana bukan lagi Indonesia yang membangun Desa, tetapi Desa lah yang diharapkan untuk membangun Indonesia di kala ini.

Tabel 2.1
Pengelompokan Desa Berdasarkan Angka Indeks Desa Membangun (IDM)

No.	Status Desa	Angka Batas
1.	Mandiri	≤ 0,815

2.	Maju	0,707 dan 0,815
3.	Berkembang	> 0,599 dan 0,707
4.	Tertinggal	> 0,491 dan 0,599
5.	Sangat Tertinggal	≤ 0,491

Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 201 Tahun 2019

Berdasarkan observasi penulis sebelumnya Desa Miau Baru memiliki Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yaitu 0,771, Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yaitu 0,6667 dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yaitu 0,6667 sehingga Indeks Desa Membangun Desa (IDM) tahun 2020 Miau Baru saat ini yaitu 0,702 yang berstatus berkembang apabila dilihat berdasarkan batas nilai untuk menjadi desa yang maju yaitu 0,707 bisa dikatakan sudah sangat mendekati menjadi desa yang maju. Setiap tahunnya desa ini menunjukkan progres yang selalu meningkat, baik dalam penyediaan sarana - prasarana maupun sumber daya yang ada.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian deskriptif yang mengarahkan penelitian kepada tujuan untuk menggambarkan serta menganalisis bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan status desa menuju desa mandiri di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.

Tempat obyek penelitian yaitu Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Dengan waktu pada bulan Juni 2020 dan selesai pada bulan November 2020.

Sumber data dalam penelitian ini primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan, sumber data sekunder

digunakan untuk mendukung dan mencari fakta yang sebenarnya. *Purposive Sampling* adalah teknik menentukan sumber informasi secara *purposive* dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu (Yusuf, 2015:368). Kemudian penelitian ini juga menggunakan teknik *accidental sampling* di mana penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti yang dapat digunakan sebagai sampel, bila peneliti memandang orang yang kebetulan itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2009).

Pembahasan

A. Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Status Desa Menuju Desa Mandiri

Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Usaha merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan (Poerwadarminta dalam Makarno 2018:4). Beberapa pengertian juga ditambahkan oleh Soetardjo (dalam Wasistiono 2006 : 14) desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri yang menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk.

Pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek penghidupan desa, baik dalam bidang pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*) dan

peremberdayaan masyarakat (*empowerment*). Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat dalam sistem.

Lebih lanjut Dwipayana dan Eko (2003) menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik dalam lingkup desa ada dua langkah yang penting untuk diperhatikan.

1. Pertama, pemerintahan demokratis, yaitu pemerintah desa yang berasal dari partisipasi masyarakat, dikelola dengan akuntabilitas dan transparansi oleh masyarakat, dan kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk responsivitas masyarakat desa itu sendiri.
2. Kedua, hubungan antarelemen pemerintahan di desa berdasarkan pada prinsip kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan dalam melakukan pembangunan desa secara kolektif untuk mencapai kebaikan bersama (*common good*).

Berkenaan dengan konsep tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah desa menjadi alat dan tolak ukur bagi masyarakat desa dalam terselenggaranya suatu pemerintahan desa dalam mengambil langkah dalam meningkatkan status desa menuju desa mandiri. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Hamidi (2015:17) dalam buku Indeks Desa Membangun mengelompokkan desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; dengan nama lain desa pratama merupakan Desa sangat tertinggal atau yang disebut desa pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi

serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

(ii) Desa Tertinggal; dengan nama lain desa pra-madya merupakan yang memiliki potensi dibidang sosial sosial, ekonomi dan ekologi namun belum atau kurang dalam pengelolaannya serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. (iii) Desa Berkembang; dengan nama lain desa madya adalah desa yang berpotensi menjadi desa maju memiliki potensi dibidang sosial sosial, ekonomi dan ekologi namun belum atau kurang dalam pengelolaannya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan. (iv) Desa Maju; dengan nama lain desa pra-semabada merupakan desa yang memiliki potensi sumber daya dalam aspek sosial, ekonomi dan ekologi serta memiliki kemampuan mengelolanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan. (v) Desa Mandiri dengan nama lain swasembada merupakan sebuah desa maju yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembangunan di desa dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat desa baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun ekologi berkelanjutan. Menurut Kurniawan (2015:23) dalam buku Desa Mandiri, secara umum desa mandiri dicirikan secara umum, yaitu:

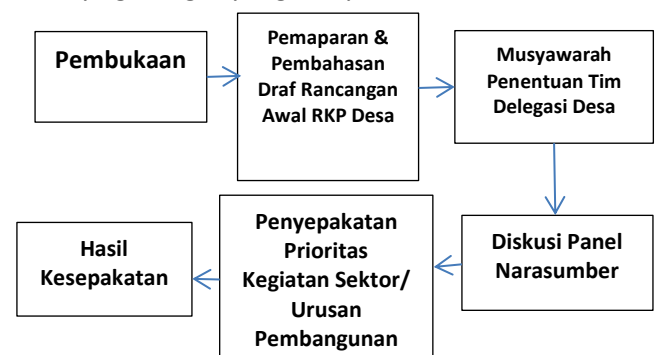
- 1) Kemampuan desa mengurus dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya.
- 2) Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang di dukung oleh kemandirian dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan (desa bisa merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan pembangunan dan pengawas hasil pembangunan untuk kesejahteraan warga desanya).

- 3) Dalam kapasitas dan sistem pemerintahan dengan menjunjung tinggi partisipasi dan aspirasi warga desa termasuk di dalamnya masyarakat miskin, kaum muda, difabel, penyandang masalah sosial dan sebagainya.
- 4) Sumber daya pembangunan dikelola secara optimal transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan sosial seluruh warganya.

Beberapa faktor yang menjadi fokus berdasarkan buku Desa Mandiri (Kurniawan 2015:17), Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Status Desa Menuju Desa Mandiri di Desa Miau Baru. kecamatan Kongbeng, antara lain:

1. Upaya Kapasitas Organisasi

Pemerintah Desa dalam membangun kapasitas organisasi menurut GZT (dalam) yaitu dapat dilihat dari seberapa besar kemampuan organisasi menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, Intruksi Mendagri Nomor 21 Tahun 1992, unit pemerintahan terendah yaitu desa memiliki fungsi (pasal 3) yaitu melaksanakan kegiatan guna pembinaan kemasyarakatan, melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa, melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.



Gambar 4.2 : Alur Rembuk Desa Perencanaan Desa Miau Baru

Dalam proses alur rembuk pada gambar 4.2, menjelaskan proses yang dilakukan Pemerintah Desa Miau Baru untuk meningkatkan kinerja aparatur dengan pembentukan Peraturan Desa yaitu terkait peraturan kewenangan desa, pungutan, kedudukan keuangan aparatur desa, lembaga kemasyarakatan desa dan badan usaha milik desa. Dalam proses peyusunan tersebut tidak hanya ada peran Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsinya, namun juga campur tangan masyarakat yang berwenang dalam proses alur yang tergambar di atas bahwa tetap mengedepankan sifat demokratis yaitu dengan adanya diskusi sehingga menghasilkan kesepakatan bersamabai menghasilkan kebijakan berupa peraturan kewenangan desa dan peraturan kelembagaan desa. Hal yang menarik dan unik bahwa bentuk transparansi yang ada di Desa Miau Baru seperti yang dijelaskan di atas yaitu melalui media "Surong" sehingga ketika adanya arahan, kebijakan atau informasi terkait desa dapat diketahui dan diperoleh dengan mudah oleh masyarakat Desa Miau Baru.

Serta adanya bentuk pelatihan - pelatihan yang diprogramkan guna pemberdayaan kemasyarakatan seperti operator mesin cetak, menjahit, dan kerajinan teknik mesin. Kemudian, dari segi kapasitas organisasi juga digambarkan melalui kegiatan rutin dalam rangka membangun edukasi masyarakat yaitu "Pepang Kauh Tupuh Duman" dimana dalam kegiatan tersebut melibatkan peran masyarakat dari berbagai kalangan yang di dalamnya pembahasan membahas mengenai program untuk kemajuan desa ke

depan sekaligus evaluasi kinerja mencakup desa. Hal tersebut juga didukung dengan partisipasi swadaya masyarakat yang secara mandiri menanamkan jiwa partisipasi dan gotong royong secara turun - temurun.

Sehingga, sejalan dengan fokus penelitian yang ada dalam konteks upaya kapasitas organisasi bahwa ketika masyarakat bersifat kritis dan responsif dalam bentuk tindakan nyata yang dilakukan oleh masyarakat dimana masyarakat mudah untuk diarahkan, maka hal tersebut menunjukkan adanya hal yang tidak dapat dipisahkan antara sistem yang dimiliki Desa Miau Baru didukung oleh aparatur desa yang berdedikasi dan didasari dengan jiwa semangat yang telah tertanam sehingga hal tersebut penulis nilai dapat mempercepat untuk meningkatkan status desa menuju desa yang mandiri.

2. Upaya Perencanaan dan Pelaksanaan Program

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi, 2011:28) perencanaan adalah sebuah proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan- kegiatan yang hendak dilakukan berdasarkan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses perencanaan tentu memiliki langkah-langkah dalam perencanaannya yaitu mengidentifikasi dan menganalisis masalah, merumuskan yang hendak dicapai, menyusun garis besar dalam bentuk proposal, mengadakan kontak atau diskusi antar unit, persetujuan atau kesepakatan perencanaan dan penjabaran untuk pelaksanaan (Prajudi dalam Syafie, 2007:50). Hal tersebut tersebut gambarkan melalui alur rembuk desa perencanaan Desa Miau Baru seperti gambar 4.2

mengenai alur rembuk desa dalam perencanaan Desa Miau Baru.

Tabel 4.3
Program Desa Miau Baru

No	Program
1.	Mengedepankan Transparansi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa
	Penyusunan dan Penetapan APB Desa dan Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa
2.	Membuat Inovasi Strategi Penyusunan Tata Ruang Desa
	Menciptakan Sinergitas antar-masyarakat dalam Memaksimalkan Lahan yang ada (Pertanian dan Perkebunan)
3.	Memaksimalkan Pengelolaan dan Aset Desa
	Mengelola Tanah Kas Desa Yang Sifatnya Produktif dan Program Desa Wisata (POKDARWIS)
4.	Pengembangan Data dan Informasi Desa
	Pelatihan dan Pengembangan Website
5.	Peningkatan Kapasitas Melalui Pelatihan Usaha Ekonomi Desa
	Pelatihan BUMDES & Pengemasan Produk Beras
6.	Peningkatan Kapasitas Masyarakat
	Study Banding PKK (Jawa) dan Kerajinan Tangan dari Kayu, Pelatihan (Wirausaha, Pengelolaan Pupuk Organik, Menjahit, Bordir, Sablon, Operator Mesin Cetak, Budidaya Ayam Telur),
7.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pem. Desa dan BPD
	Studi Banding (Tangerang Selatan)

Sumber : RPJMD Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Tahun 2015 -2020

Tabel di atas menunjukkan berbagai macam program sebagai bentuk perencanaan yang di tentukan melalui rembuk desa yaitu diantaranya mengedepankan transparansi dalam pengelolaan keuangan yang tentunya bertujuan untuk mencegah

adanya penyimpangan penggunaan dana, kesalahan persepsi atau komunikasi dan hal tersebut juga dapat membangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak terkait pengelolaannya. Sehingga kepercayaan tersebut mampu untuk memperkuat fondasi untuk meningkatkan status desa menuju desa mandiri.

Konteks perencanaan juga digambarkan dalam bentuk program pada tabel 4.3 di antaranya program dalam meningkatkan status desa menuju desa mandiri yaitu Program Desa Wisata yang saat ini dalam proses pengurusan dan hal tersebut selaras dengan visi dan misi yang adayaitu “**Desa Otonom, mandiri, beriman serta lestari budaya dan adat istiadat**”. Dikarenakan saat ini Desa Miau Baru juga memiliki prioritas yaitu pemekaran Desa Miau Baru Utara guna menjaga hutan adat bagi generasi selanjutnya maka, hal tersebut penulis nilai dapat menjadi strategi untuk memperkecil lingkup adminstrasi Desa Miau Baru, sehingga kedepannya ketika pemekaran tersebut selesai dilaksanakan, maka biaya/anggaran dapat difokuskan dan dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Desa Miau Baru. Kemudian, adanya program inovasi strategi penyusunan tata ruang desa dengan memaksimalkan lahan yang ada, berdasarkan yang penulis amati di lapangan bahwa, ketika masyarakat terbatas untuk mengelola lahan yang dimiliki baik pertanian maupun perkebunannya, masyarakat secara inisiatif bekerjasama dengan warga yang lain yang mampu mengelola lahan tersebut sehingga kedua belah pihak membuat kesepakatan bagi hasil yang menguntungkan keduanya sehingga terciptanya sinergi yang baik

antar-masyarakat Desa Miau Baru.

3. Upaya Ketersediaan Sumber Daya

Kemampuan Sumber Daya ini meliputi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. Menurut Soerinegara (dalam Amanah, 2017:4) segala sesuatu yang ada di alam yang mampu memberikan manfaat pada manusia maka itu disebut dengan sumber daya alam.

Tabel 4.4
Sumber Daya Alam Desa Miau Baru

No	Potensi	Luas/Kapasitas
1.	Hutan	23.430,00 Ha
2.	Lahan Perkebunan	8.461,00 Ha
3.	Lahan Kering	3.546,00 Ha
4.	Lahan Pertanian (Sawah)	3.370,00 Ha
5.	Bendungan	100 Ha
6.	Lahan Fasilitas Umum	25,35 Ha

Sumber : Potensi Desa dan Kelurahan 2019

Desa Miau Baru memiliki sumber daya alam yang sifatnya dapat dibaharui, selain program untuk mempertahankan hutan adat yang dimiliki untuk generasi selanjutnya dalam program pemekaran desa, tetapi juga potensi sumber daya alam berupa lahan kering dan lahan persawahan irigasi teknis yang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Desa Miau Baru, sedangkan lahan perkebunan dikelola secara swadaya dan kemitraan dengan perusahaan sekitar Desa Miau Baru. Komoditi utama dikembangkan berupa padi, kelapa sawit, kakau, karet dan lada. Melihat hal tersebut Desa Miau Baru dapat dikatakan memiliki potensi Sumber Daya

Alam (SDA) yang mumpuni. Sumber daya alam yang dimiliki Desa Miau Baru yang mendukung meningkatkan status desa menjadi desa mandiri berupa sungai - sungai dan bendungan yang berpotensi untuk dijadikan objek wisata seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki juga berupa lahan pertanian (sawah) yang tergolong dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri.

Dengan potensi alam yang ada seperti lahan pertanian yang mampu menghasilkan secara mandiri kebutuhan masyarakat akan pangan dan juga bendungan yang berpotensi untuk dikelola dengan maksimal yang mampu menambah pendapatan desa, maka hal tersebut mampu menjadi jalan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya secara mandiri untuk meningkatkan status desa menuju desa mandiri.

Tabel 4.6
Sarana dan Prasarana di Desa Miau Baru

a.	Kantor Desa	Tersedia
b.	Gedung Kantor Badan Usaha Milik Desa	Tersedia
c.	Rumah Ibadat (Gereja dan Masiid)	7 buah
d.	Akses Jalan	4,68 km
e.	Bangunan Pengolahan Air Bersih/minum	1 unit
f.	Prasarana Kesehatan	
1)	Puskesmas dan Pus. Pembantu	2 buah
2)	Apotik	1 buah
3)	Posvandu	7 buah
g.	Sarana Kesehatan (Dokter & Bidan)	50 orang
h.	Prasarana dan Sarana	

Pendidikan		Sumber : Potensi Desa dan Kelurahan 2019	
1	Gedung (SMA, SMP, SD, TK)	9 buah	Dalam konteks ketersediaan sumber daya belum maksimal kesiapannya. Menurut
2	Perpustakaan Desa/ Kelurahan	1 buah	Edward III (dalam Yusuf dkk 2018:4) kedudukan sumber daya manusia dapat

Sumber : RPJMD Desa Miau Baru Kecamatan kongbeng tahun 2015 - 2020

Melihat sarana dan prasarana tersebut tidak hanya mampu mendukung dan menunjang masyarakat di Desa Miau Baru dalam meningkatkan kualitas dirinya, namun ada peluang yang baik apabila gedung maupun lapangan yang ada di Desa Miau Baru mampu dimanfaatkan untuk menambah pendapatan desa, misalnya penyewaan gedung atau lapangan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung serta kebudayaan lokal yang dimiliki juga dapat menjadi sumber daya bagi Desa Miau Baru untuk memandirikan desanya.

**Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Laki laki	Perempuan
1	Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	211 orang	188 orang
2	Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK	96 orang	79 orang
3	Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	621 orang	600 orang
4	Tamat D-1/ Sederajat	0 orang	4 orang
5	Tamat D-3/ Sederajat	9 orang	14 orang
6	Tamat S-1/ Sederajat	38 orang	35 orang
7	Tamat S-2/ Sederajat	2 orang	1 orang

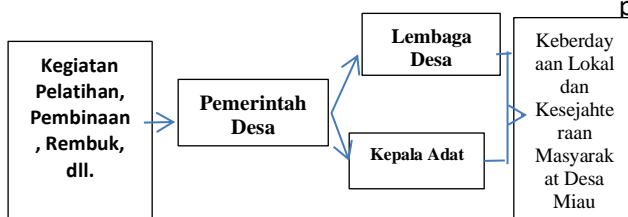
dikategorikan sebagai faktor utama dan tidak dapat diabaikan karena manusia merupakan penggerak dari aktivitas organisasi untuk mencapai tujuannya. Dilihat dari segi sumber daya manusianya dimana kualitas sumber daya manusia di Desa Miau Baru masih tergolong rendah dikarenakan kualitas pendidikan yang masih perlu ditingkatkan, perlu adanya banyak pelatihan maupun bimbingan teknis (BIMTEK) dan perlu juga dibangun kerjasama dengan para pihak dalam mendukung upaya tersebut. Peran masyarakat lokal desa sangat dibutuhkan, dalam hal ini tidak hanya kesadaran sosial untuk memajukan dan membangun desa, namun dibutuhkan kesadaran untuk meningkatkan kualitas diri karena dalam mengelola sumber daya alam yang ada dibutuhkan pengetahuan, teknologi atau keterampilan (*skill*) untuk memanfaatkannya secara maksimal (Rees dalam Akhmad 2017:4).

Diharapkan dalam jangka panjang, akan semakin banyak masyarakat Desa Miau Baru khususnya generasi muda yang mampu menempuh jenjang pendidikan yang berkualitas, Pendidikan merupakan sarana yang mendukung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada karena ketika masyarakat memiliki pendidikan yang baik, maka manusianya juga akan semakin berkualitas sehingga ketika masyarakat berkualitas secara intelektual dan kebutuhan, maka

mampu mempercepat upaya untuk meningkatkan status desa menuju desa mandiri.

4. Upaya Kelembagaan

Menurut Utami (dalam Sofi 2014:201) kelembagaan merupakan organisasi yang berfungsi untuk tercapainya stabilitas dan keteraturan. Sehingga hal tersebut menjadi aspek yang menggambarkan peran Pemerintah Desa beserta lembaga yang ada untuk menuntun masyarakat mencapai tujuan yang ingin dituju bersama. Upaya kelembagaan desa berdasarkan fokus penelitian ini dapat dilihat dari kolaborasi antara Pemerintah Desa dengan kelembagaan yang ada di desa. Kolaborasi merupakan bentuk kerjasama, interaksi dan kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga atau pihak yang terlibat (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2014). Sejalan dengan itu, kolaborasi tersebut dapat dilihat dari bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam melaksanakan peran dengan cara memadukan dan mengintegrasikan berbagai potensi yang ada (Salman dalam Ciptaningsih 2016:5).



Gambar 4.3 : Kolaborasi Kelembagaan Desa Miau Baru

Bagan di atas memperlihatkan dimana garis koordinasi antara Pemerintah Desa Miau Baru dengan lembaga desa dan lembaga adat tersebut tidak hilang, penulis

menilai dikarenakan adanya keaktifan Pemerintah Desa dalam berkoordinasi serta dalam pengawasan yang terjadi. Kelancaran dapat berjalan melalui komunikasi yang terus dibangun sehingga keberdayaan lokal dan kesejahteraan masyarakat juga turut tercipta.

Upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan status desa menuju desa mandiri dalam konteks kelembagaan desa yaitu dalam gambar 4.3 mengenai kolaborasi kelembagaan Desa Miau Baru dimana setiap kegiatan, pembinaan, rembuk dan lainnya dalam pelaksanaannya diketahui oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Desa tentunya tidak lepas dari koordinasi sehingga tercipta kolaborasi dengan lembaga desa dan lembaga adat dimana guna membangun keberdayaan lokal dan kesejahteraan masyarakat di Desa Miau Baru.

Kemudian juga digambarkan melalui inisiatif Pemerintah Desa yang telah bersepakat dengan Kepala Adat dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut masyarakat desa secara adat kekeluarga tanpa langsung melibatkan pihak eksternal atau pihak kepolisian. Adanya kolaborasi yang baik tentunya inisiatif dalam mengatasi jika ada permasalahan di desa tanpa melibatkan pihak luar terlebih dahulu dan hal tersebut mampu untuk memfokuskan

Desa Miau Baru kepada setiap langkah - langkah yang diupayakan. Dalam konteks upaya kelembagaan desa tersebut membuktikan bahwa upaya kelembagaan desa yang dimiliki mampu menjadi langkah yang efektif untuk meningkatkan status desa menuju desa mandiri.

B. Penghambat Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Status Desa Menuju Desa Mandiri Di Desa Miau Baru

Dalam usaha untuk meningkatkan status desa menuju desa yang mandiri tentu tak lepas dari kendala yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh penyelenggara pemerintahan desa dalam menjalankan program maupun hal yang telah direncanakan sedemikian rupa. Faktor penghambat yang dialami oleh Pemerintah Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur yaitu:

1. Keterbatasan Anggaran/Biaya

Dalam upaya mengambil langkah melaksanakan pembangunan, program maupun kebijakan untuk meningkatkan status desa menuju desa mandiri di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur yaitu keterbatasan biaya yang dibutuhkan, seringkali ketika Pemerintah Desa sudah memiliki program atau perencanaan yang matang seringkali biaya yang tidak ada. Hal ini dikarenakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang mengalami kemacetan dan diterima secara bertahap akibat kondisi *covid-19* dibagi 60% yang saat ini disalurkan mejadi tiga tahap; tahap satu 35%; tahap dua 15% dan; tahap tiga 10%. Kemudian 40% juga pertahap entah itu jadi dua atau tiga tahap. Untuk saat ini baru masuk tahap satu, namun terpakai untuk Biaya Langsung Tunai (BLT)" (Wawancara, 22/06/20). Hal tersebut tentu menuntut agar Kepala Desa dengan aparatur Desa Miau Baru lainnya untuk memutar pikiran dalam menemukan sebuah upaya sehingga penyelenggaraan

pemerintah desa tetap berjalan dan tentunya kedepannya akan meningkatkan status desa menjadi desa yang mandiri. Keterbatasan biaya inilah yang menyebabkan beberapa aspek belum dapat berjalan dengan maksimal.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mejadi salah satu aspek yang sangat perlu diperhatikan sebagai upaya untuk meningkatkan status desa menuju desa mandiri. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat diatasi apabila perangkat desa bersama masyarakat serta lembaga organisasi yang ada di desa untuk menumbuhkan kesadaran untuk membangun, membina dan menggerakkan berupa pelatihan - pelatihan melalui potensi yang ada di desa.

C. Pendukung Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Status Desa Menuju Desa Mandiri

Dalam upaya meningkatkan status desa menuju desa mandiri berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan tentu terdapat faktor yang mendukung upaya tersebut antara lain:

1. Kolaborasi Antar Pemerintah Desa Yang Baik

Apabila aparatur Pemerintah Desa mampu bekerjasama serta berkolaborasi dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, maka akan lebih mempermudah dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan target yang ingin dicapai yaitu desa yang mandiri. Seperti pendapat yang disampaikan oleh bapak Langat Ifung "Relasi dan kolaborasi kami sebagai Pemerintah Desa bersama dengan

lembaga desa yang ada serta tak lupa peran Kepala Adat di Desa Miau Baru pun saat ini bisa dikatakan berjalan dengan sangat baik, apalagi ketika ingin membuat sebuah program kegiatan di desa kita ini, dan selama ini tidak ada masalah yang begitu serius terjadi begitupun dengan masyarakat yang ada di sini dan mungkin juga karena rasa kekeluargaan yang kuat diantara kita disini, jadi semua bisa berjalan dengan baik dan lancar”.

Keuntungan kolaborasi antar Pemerintah Desa yang baik yaitu menjadi acuan kerja untuk menjalankan peran dan tanggung jawab masing - masing. Dengan demikian akan lebih teratur dalam menjalankan kegiatannya untuk mencapai targetnya. Hal ini juga dapat mengurangi kemungkinan untuk terjadinya salah komunikasi

2. Sumber Daya Alam Yang Memadai

Sumber daya alam yang dimiliki Desa Miau Baru tersebutlah yang menjadi salah satu keunggulan sebagai upaya meningkatkan status desa menuju desa yang mandiri. Memiliki komitmen untuk memanfaatkan Sumber daya alam yang ada, namun juga tidak lupa untukberkomitmen untuk tetap menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada agar tetap ada hingga generasi selanjutnya.

3. Potensi Kebudayaan Lokal

Potensi kebudayaan lokal yang dimiliki menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan status desa menuju desa yang mandiri kedepannya terbukti dengan yang penulis amati langsung di lapangan, seperti areal pemakaman yang bisa terbilang cukup unik karena di hiasi dengan motif ukiran dayak kayan kemudian balai

desa serta acara - acara adat yang sering diselenggarakan disetiap tahunnya. Dengan konsistensi dan komitmen yang terus - menerus dipupuk dan ditumbuhkan kepada seluruh masyarakat Desa Miau Baru akan mempercepat target yaitu meningkatkan status desa menuju desa yang mandiri.

Kesimpulan

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Miau Baru tergolong belum maksimal untuk meningkatkan status desanya menuju desa mandiri. Masing-masing upaya memiliki hubungan dan keterkaitan yang saling mempengaruhi dan mendukung satu sama lain dalam mengambil langkah sebagai upaya meningkatkan status desa menuju desa mandiri sehingga yang menjadi benang merah dalam penelitian ini yaitu yang tergolong siap dari segi upaya kapasitas organisasi ditunjukkan dengan adanya keselarasan sistem yang dimiliki didukung dengan aparatur yang memiliki dedikasi dan jiwa semangat yang telah tertanam untuk menjalankan sistem yang ada dikarenakan organisasi dapat berjalan dengan baik adanya keunggulan *culture* yang menjadi dasar kegiatannya dan upaya kelembagaan tidak terdapat hal serius yang menjadi persoalan maupun hambatan dalam pelaksanaannya tercermin dengan bentuk kolaborasi antar aparatur Pemerintah Desa dan lembaga desa yang ada dan bentuk inisiatif yang dimiliki, dan dalam kesiapan upaya perencanaan berdasarkan data yang penulis peroleh hanya terhambat dalam hal anggaran/biaya untuk pelaksanaannya dan membutuhkan bimbingan teknis bagi aparatur desa secara khusus dalam pengelolaan keuangan desa yang berbasis aplikasi. Sedangkan, kesiapan

dalam upaya ketersediaan sumber daya yang menjadi penghambat yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus terus ditingkatkan dan diprioritaskan karena hal tersebut penulis nilai sebagai titik awal/langkah mempercepat untuk meningkatkan status desa menuju desa mandiri.

Oleh karena itu dalam rangka menyikapi masih terdapat upaya yang tergolong belum maksimal dalam pelaksanaannya, maka diperlukan **Pertama**, Pemerintah Desa perlu terus melakukan evaluasi sehingga setiap indeks dapat tersentuh secara merata sehingga setiap aspek memiliki hasil yang tepat sasaran. **Kedua**, Seluruh aparatur desa baik Pemerintah Desa bersama dengan lembaga - lembaga yang ada di Desa Miau Baru perlu mengambil langkah yang pasti untuk bergerak dalam melaksanakan program yang akan dilaksanakan agar dapat terlaksana secara maksimal, baik dari segi pendampingan kelompok - kelompok usaha yang ada di desa, pemberdayaan masyarakat, maupun mengembangkan BUMDes yang saat ini masih sangat perlu ditingkatkan semangat, inovasi serta kreatifitasnya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat berkelanjutan.

Ketiga, Selain usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk menggerakkan dan mengarahkan, dalam hal ini peran dan partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta budaya yang ada di masyarakat. **Keempat**, Pemerintah Desa juga harus mampu menjaga interkasi dan membangun kerjasama yang baik dalam mendukung

sumber daya, seperti peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang bekerjasama dengan pihak - pihak yang mampu mendukung kemajuan dan kemandirian desa dalam mengembangkan pariwisata dan potensi yang ada di Desa Miau Baru. **Kelima**, Perlu adanya evaluasi kinerja yang terus - menerus dilakukan baik dalam menentukan program apa yang akan dilakukan ke depan atau langkah apa yang perlu dijalankan.

Referensi

Dokumen:

- Indeks Desa Miau Baru 2020
- Intruksi Mendagri Nomor 21 Tahun 1992 Pasal 3
- Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 201 Tahun 2019
- RPJMD Desa Miau Baru Kecamatan kongbeng tahun 2015 – 2020
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Buku dengan Penulis Tunggal

- Dwipayana, Ari dan Sutoro Eko. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Press. Yogyakarta
- Hamidi, Hanibal. 2015. *Indeks Desa Membangun*. Jakarta Selatan: Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Kurniawan, Borni. 2015. *Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA BANDUNG
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Yusuf, A. Muri. 2015. *Metode Penelitian*

Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta : Prenadamedia Group.

Artikel Jurnal

- Ariyati, Sofi dkk. 2014. *Efektifitas Kelembagaan Desa Dalam Praktik Demokrasi di Desa Kelangdepok.* Jawa Tengah: IPB. Vol (2) No (03) Hal (202)
- Fauzi, Akhmad. 2017. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan.* Jakarta: Gramedia. Hal (4)
- Makarno dkk. 2018. *Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.* Samarinda: FISIP Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
- Nugrahaningsih, Putri dkk. 2016. *Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri.* Jawa Tengah: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Vol (16) No (1)
- Soetopo, Dhalia dkk. 2019. *Desa Gombengsari Sebagai Desa Ekowisata Dengan Branding Kopi Menuju Desa Mandiri.* Banyuwangi: Universitas PGRI. Vol (13) No (1).
- Yusuf dkk. 2018. *Kapasitas Organisasi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Di Indonesia.* Bandung: Universitas Padjajara. Vol (1) No (1)